



KATALOG BPS: 3303002.31

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

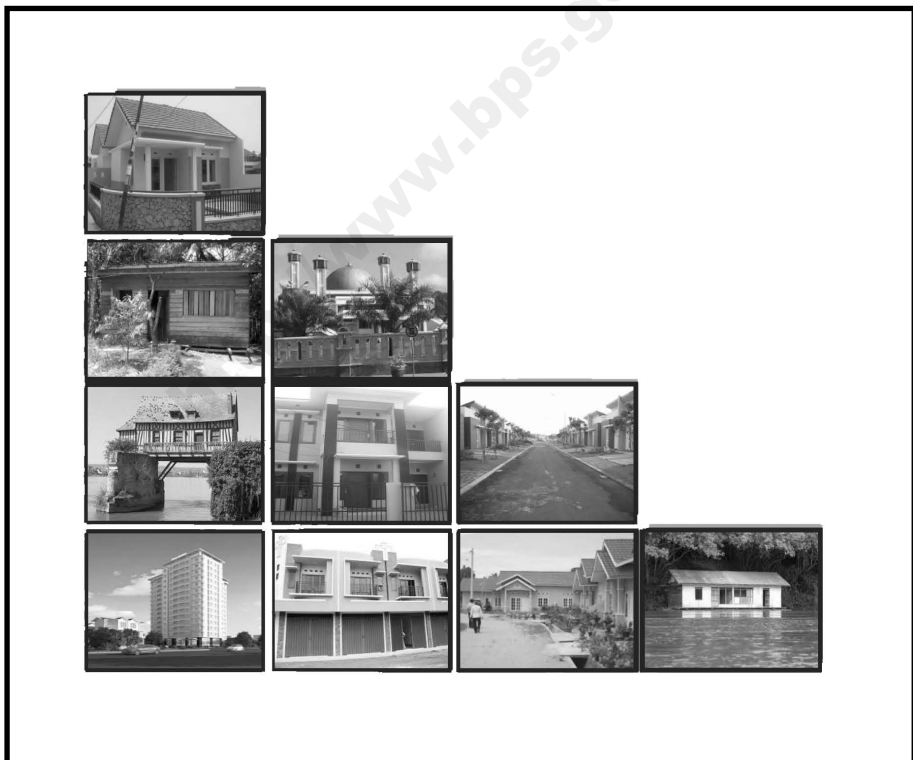
(Hasil Sensus Penduduk 2010)



BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA

STATISTIK PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

(HASIL SENSUS PENDUDUK 2010)



Statistik Perumahan Provinsi DKI Jakarta

(Hasil Sensus Penduduk 2010)

ISBN: 978-979-064-429-8

Nomor Publikasi: 042300.1113

Katalog BPS: 3303002.31

Ukuran Buku: JIS B5 (7,17 inch x 10,12 inch)

Jumlah Halaman: 37 Halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Gambar kulit:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh:

CV. Dharmaputra

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) disamping mengumpulkan keterangan demografi juga mengumpulkan data perumahan. Publikasi ini merupakan publikasi dari hasil pengumpulan data Perumahan SP 2010 yang diterbitkan dalam bentuk buku untuk setiap provinsi dan buku dengan data agregat Indonesia.

Buku Statistik Perumahan ini menyajikan gambaran analisis diskriptif situasi dan perkembangan perumahan. Data yang disajikan meliputi data tentang status kepemilikan bangunan, jenis dan luas lantai, sumber penerangan utama, sumber air minum, sanitasi, bahan bakar untuk memasak, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Publikasi ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan penentuan kebijakan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta pengguna data lain dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi program pembangunan perumahan.

Kepada tim penulis yang membuat publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan publikasi ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2011

Deputi Bidang Statistik Sosial



Drs. Wynandin Imawan, M.Sc

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup.....	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	2
1.4 Konsep dan Definisi.....	2
1.5 Sumber Data.....	8
 BAB II KARAKTERITIK PERUMAHAN	 11
2.1 Persebaran Penduduk.....	12
2.2 Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan.....	13
2.2.1. Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal ...	13
2.2.2. Bukti Kepemilikan.....	15
2.3 Jenis dan Luas Lantai.....	17
2.3.1. Jenis Lantai Terluas.....	17
2.3.2. Luas Lantai.....	18
2.4 Sumber Penerangan Utama.....	20
2.5 Sumber air Minum.....	21
2.6 Sanitasi.....	23
2.6.1. Fasilitas Tempat Buang Air Besar.....	23
2.6.2. Tempat Pembuangan Akhir Tinja.....	23
2.7 Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari.....	25
2.8 Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal	25
2.9 Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	26
 BAB III PENUTUP	 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keterbandingan Informasi Perumahan menurut Jenis Kuesioner, 2010.....	9
Tabel 2.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dokumen, 2010	12
Tabel 3.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Tempat Tinggal, 2010.....	13
Tabel 4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010..	15
Tabel 5.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, 2010.....	16
Tabel 6.	Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Menurut Jenis Bukti Kepemilikan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	17
Tabel 7.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas dan Daerah Tempat Tinggal, 2010.....	18
Tabel 8.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2010.....	20
Tabel 9.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum, 2010.....	22
Tabel 10.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2010.....	23
Tabel 11.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang Fasilitas Buang Air Besarnya Jamban menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Provinsi DKI Jakarta, 2010.....	24
Tabel 12.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak di Provinsi DKI Jakarta, 2010.....	25
Tabel 13.	Persentase Rumah Tangga menurut Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010.....	26
Tabel 14.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Telepon, 2010.....	27
Tabel 15.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Akses Internet selama 3 Bulan Terakhir, 2010.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persebaran Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2010.....	13
Gambar 2. Persentase Rumah Tangga Yang Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri menurut Kabupaten/Kota, 2010.....	14
Gambar 3. Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri dan Memilik Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal menurut Jenis Bukti Kepemilikan, 2010.....	16
Gambar 4. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita, 2010.....	19
Gambar 5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Listrik menurut Jenis Sumber Penerangan, 2010.....	21
Gambar 6. Persentase Rumah Tangga yang Fasilitas Buang Air Besarnya Jamban dan Tempat Akhir Pembuangan Tinjanya Tangki Septik menurut Kabupaten/Kota, 2010.....	24

<http://www.bps.go.id>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua penduduk/orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Sensus penduduk di Indonesia biasa disebut pencacahan penduduk, yaitu pengumpulan data/informasi yang dilakukan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Data yang dikumpulkan antara lain: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat lahir. Hasilnya adalah data jumlah penduduk beserta karakteristiknya, yang sangat berguna sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. SP2010 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi penduduk, perumahan, pendidikan dan ketenagakerjaan sampai wilayah administrasi terkecil.

Perumahan merupakan kebutuhan utama disamping pangan dan sandang bagi setiap orang yang idealnya dapat dimiliki oleh setiap rumah tangga dengan kondisi yang layak. Perumahan merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat. Selain merupakan kebutuhan pokok, keadaan perumahan juga mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan, pembinaan watak dan kepribadian penghuninya serta merupakan faktor penting pula terhadap produktivitas kerja seseorang. Dengan demikian keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi. Tetapi di lain pihak kemampuan untuk mengusahakan adanya perumahan yang layak tergantung sekali daripada adanya perkembangan serta pembangunan ekonomi.

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, bukti kepemilikan tanah tempat tinggal, jenis lantai, luas lantai, sumber penerangan, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja, bahan bakar untuk memasak sehari-hari, penguasaan telepon, dan akses internet selama 3 bulan terakhir. Data yang disajikan dalam publikasi ini, seluruhnya memanfaatkan data perumahan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Publikasi ini juga merupakan rangkaian dari publikasi serupa di 33 provinsi dan nasional yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) sehubungan dengan telah selesainya kegiatan SP2010.

Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik disertai ulasan atau analisis deskriptif pada level provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan melalui penyajian data seperti itu, pengguna data akan lebih mudah untuk memahami dan lebih tertarik untuk membacanya.

1.2. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan penulisan Statistik Perumahan Provinsi DKI Jakarta ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna data di bidang perumahan yang bersumber dari data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Data perumahan yang digunakan berasal dari keadaan bangunan yang ditempati oleh rumah tangga, karena SP2010 adalah sensus yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga.

SP2010 mencakup seluruh penduduk warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tuna wisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil/terasing, dan penghuni perahu/rumah apung). Anggota korps diplomatik negara lain beserta anggota rumahtangganya, meskipun menetap di wilayah teritorial Indonesia, tidak dicakup dalam pencacahan SP2010. Anggota korps diplomatik negara lain beserta anggota rumahtangganya, meskipun menetap di wilayah Provinsi Aceh, tidak dicakup dalam pencacahan SP2010.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyajian pada penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab. Bab Pertama, yaitu Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, sistematika penulisan, serta konsep dan definisi. Bab Kedua adalah karakteristik perumahan di Provinsi DKI Jakarta hasil SP2010 serta Bab Ketiga Penutup.

1.4. Konsep dan Definisi

Bangunan fisik adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10 m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

Contoh bangunan fisik: rumah, hotel, toko, pabrik, sekolah, masjid, kuil, gereja, gedung kantor, balai pertemuan, dan sebagainya.

Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

Milik sendiri adalah jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang ART. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap milik sendiri.

Kontrak adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus dimuka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa adalah jika tempat tinggal tersebut disewa oleh krt atau salah seseorang art dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Status kepemilikan tempat tinggal lainnya adalah jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori diatas misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat, rumah dinas, termasuk didalamnya rumah bebas sewa.

Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART.

Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk ART.

Sertipikat lain adalah Tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART. Sertipikat ini bisa berupa:

- SHGB (Sertipikat hak guna bangunan)
- SHP (Sertipikat hak pakai)
- SHM-SRS (Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun)

Lainnya adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) seperti girik, akte jual beli

Girik adalah surat tanda bukti kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan Letter C yang dikeluarkan Lurah/ Kepala Desa, baik yang sudah dipecah maupun induknya. Akte Jual Beli adalah Akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris/ PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang lain. Termasuk di Lainnya adalah Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU).

Lantai adalah alas/dasar suatu bangunan tempat tinggal responden. Jenis lantai terdiri dari keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu, tanah. dan lainnya. Lantai ubin yang dilapisi karpet atau vinil tetap dikategorikan ubin. Jika lantai bangunan tempat tinggal lebih dari satu jenis, pilih yang terluas.

Luas lantai adalah keseluruhan luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga, termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus.

Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah keseluruhan luas dari semua tingkat yang ditempati.

Catatan:

1. Jika satu bangunan sensus ditempati oleh beberapa rumah tangga, maka luas lantai ruangan yang dipakai bersama, luas lantainya dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang menggunakannya.
2. Jika ada 2 bangunan terpisah yang ditempati oleh satu rumah tangga dan masih dalam satu blok sensus, maka luas lantainya dihitung seluruhnya.
3. Taman yang di dalam rumah, atau yang di samping rumah namun masih di bawah atap, semuanya ditambahkan sebagai luas lantai.

Listrik non PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari aki (*accu*), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang dikelola bukan oleh PLN).

Listrik PLN meteran adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan cara berlangganan dan ada meteran sebagai pengukur jumlah pemakaian listrik di rumah tangga. Termasuk dalam kategori ini adalah rumah tangga yang menggunakan satu meteran secara bersama-sama. Dalam SP2010, rumah tangga yang tinggal di apartemen dianggap memiliki sumber penerangan listrik PLN meteran.

Listrik PLN tanpa meteran adalah sumber penerangan yang diproduksi PLN (Perusahaan Listrik Negara) tetapi tidak ada meteran yang terpasang di rumah. Termasuk dalam kategori ini adalah jika suatu rumah tangga mengambil listrik secara ilegal.

Bukan listrik adalah jika rumah tangga menggunakan sumber penerangan bukan listrik, seperti lampu gas elpiji (LPG) dan biogas yang dibangkitkan sendiri maupun berkelompok, sumber penerangan dari minyak tanah (petromak/lampu tekan, aladin, teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya) dan lainnya (lampu karbit, lilin, biji jarak dan kemiri).

Air kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (330 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter atau 19 liter) dan kemasan gelas, seperti antara lain air kemasan merk Aqua, VIT, Ainess, Moya, 2 Tang, MQ, dan termasuk air minum isi ulang.

Ledeng sampai rumah adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola

pemerintah maupun swasta. Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air ditempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air ledeng dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini. Ledeng eceran adalah rumah tangga yang minum dari air ledeng yang diperoleh dari pedagang air keliling dianggap mempunyai sumber air minum ledeng eceran.

Pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali. Cara pengambilannya dengan menggunakan gayung atau ember, baik dengan maupun tanpa katrol. Air sumur dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu air sumur terlindung dan tidak terlindung.

Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air rumah tangga tersebut tetap dikategorikan sumur terlindung.

Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah bila lingkaran sumur tersebut tak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur.

Mata air adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Rumah tangga yang minum air yang berasal dari mata air yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa ledeng tanpa proses penjernihan maka sumber air minumnya tetap mata air.

Mata air terlindung adalah bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air sungai adalah air yang bersumber dari sungai.

Air hujan adalah air yang diperoleh dengan cara menampung air hujan.

Sumber air lainnya adalah jenis sumber air yang tidak termasuk kategori tersebut di atas, seperti air waduk/danau, air laut, dan kolam.

Fasilitas tempat buang air besar/jamban sendiri adalah jamban/kakus yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

Fasilitas buang air besar/jamban bersama adalah jamban/kakus yang digunakan beberapa rumah tangga tertentu.

Fasilitas tempat buang air besar/jamban umum adalah jamban/kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya.

Tidak ada fasilitas tempat buang air besar/jamban adalah tidak ada fasilitas jamban/kakus, misalnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya.

Tangki septik adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton, baik yang mempunyai bak resapan maupun tidak.

Tempat pembuangan tanpa tangki septik adalah tempat pembuangan tanpa tangki septik seperti cubluk, cemplung.

Tidak punya tempat pembuangan adalah tempat pembuangan akhir seperti kolam, sawah, sungai, danau, laut, lubang tanah, pantai, tanah lapang, kebun.

Penguasaan Telepon adalah penguasaan rumah tangga atas telepon kabel (*Public Switched Telephone Network, flexi home*). Atau tanpa kabel (telepon seluler/*Hand Phone/Mobile Phone*)

Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Komputer yang digunakan untuk mengakses internet mencakup komputer yang ada di dalam rumah (yang dikuasai oleh rumah tangga) dan di luar rumah (warnet, kantor, sekolah, rumah saudara, rumah teman, dan lain-lain).

Akses Internet adalah mengoperasikan media internet secara aktif, termasuk yang mengakses internet dengan menggunakan HP.

Bahan bakar adalah jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak seperti listrik, gas, minyak tanah, arang, kayu, lainnya

1.5. Sumber Data

Sumber data publikasi ini adalah hasil Sensus penduduk 2010 (SP2010). Pada SP2010, tempat tinggal penduduk tidak sama antar satu daerah dengan daerah lainnya. Ada yang mudah aksesnya, dan ada pula yang sulit aksesnya. Hal ini tentunya membuat mekanisme pendataan tidak bisa disamaratakan untuk semua rumah tangga. Untuk mengakomodasi hal tersebut maka pendataan SP2010 menggunakan kuesioner yang berbeda untuk tiap-tiap kondisi, yaitu:

1. Kuesioner SP2010-C1 (selanjutnya disebut C1), digunakan untuk pencacahan lengkap rumah tangga umum.
2. Kuesioner SP2010-C2 (selanjutnya disebut C2), digunakan untuk pencacahan rumah tangga yang tinggal di lokasi khusus atau "tidak terpetakan", masyarakat terpencil, penghuni perahu, dan untuk anggota Korps Diplomatik RI beserta art-nya di luar negeri.
3. Kuesioner SP2010-L2 (selanjutnya di sebut L2), digunakan untuk mencacah penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap seperti tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, pengungsi dan suku terasing.

Informasi perumahan di kuesioner C1 lebih lengkap dibanding kuesioner C2 Umum dan C2 Eksklusif. Sementara pada kuesioner L2 tidak ada informasi perumahan. Karena adanya ketidaksamaan informasi perumahan yang tercakup pada masing-masing kuesioner, maka dalam penyajian datanya akan disertai keterangan jenis kuesionernya.

Untuk melihat cakupan informasi perumahan di masing-masing kuesioner, berikut ini disajikan keterbandingan tentang informasi perumahan antara kuesioner C1, C2 Umum, dan C2 Eksklusif.

Tabel 1. Keterbandingan Informasi Perumahan menurut Jenis Kuesioner, 2010

Jenis Kuesioner	Informasi Perumahan yang Dicakup
(1)	(2)
C1	jenis lantai terluas, luas lantai tempat tinggal, sumber penerangan utama rumah tangga, bahan bakar memasak, sumber utama air minum, fasilitas tempat buang air besar, tempat akhir pembuangan tinja, penguasaan telepon, akses internet dalam 3 bulan terakhir, status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, serta bukti kepemilikan
C2 Umum	luas lantai tempat tinggal, sumber penerangan utama rumah tangga, sumber utama air minum, fasilitas tempat buang air besar
C2 Eksklusif/Apartemen	<p>Luas lantai, akses internet dalam 3 bulan terakhir, status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal, serta bukti kepemilikan tanah tempat tinggal dan jenis buktinya</p> <p>Catatan:</p> <p>Jenis lantai terluas, sumber penerangan, sumber air minum, dan penguasaan telepon tidak dicakup di kuesioner C2 Eksklusif/Apartemen. Namun, karena rumah tangga yang dicacah dengan kuesioner C2 Eksklusif/Apartemen diasumsikan memiliki karakteristik perumahan yang lebih baik, maka informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis lantai terluasnya diasumsikan keramik/marmer/granit Sumber penerangannya diasumsikan listrik PLN dengan meteran Sumber utama air minumnya ledeng sampai rumah Penguasaan teleponnya diasumsikan menguasai telepon kabel dan seluler

<http://www.bps.go.id>

BAB II. KARAKTERISTIK PERUMAHAN

Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat segala kegiatan perekonomian menjadi magnet yang menyedot banyak orang untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari hasil SP2010, dimana Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah yang relatif kecil menjadi provinsi terpadat di Indonesia yang dihuni oleh 4,04 persen penduduk Indonesia sekaligus menempati urutan ke-6 provinsi dengan penduduk terbanyak. Dengan kondisi demikian menyebabkan penyediaan perumahan di wilayah DKI Jakarta menjadi masalah yang kompleks. Di satu sisi kebutuhan rumah tinggi sementara di sisi lain lahan yang tersedia sangat terbatas. Selanjutnya keterbatasan lahan ini juga potensial menimbulkan masalah-masalah yang tak kalah pelik seperti konflik kepemilikan, timbulnya pemukiman-pemukiman kumuh, kurangnya lahan hijau dan kerusakan lingkungan hidup.

Selain dihadapkan pada permasalahan keterbatasan lahan, permasalahan lain yang timbul adalah kurangnya jumlah rumah yang tersedia dibandingkan dengan banyaknya rumah tangga). Disamping kurangnya jumlah rumah yang tersedia, masih banyak rumah yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan kehidupan dan pembangunan yang layak, seperti perkampungan-perkampungan dipinggir kota dan gubuk-gubuk liar didalam kota. Demikian pula masih terdapat kesulitan-kesulitan mengenai akses terhadap fasilitas air minum, penerangan, kesehatan lingkungan dan sebagainya.

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat, sehingga perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Pembangunan perumahan sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan agar permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dapat teratasi. Agar pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan optimal dan lebih terarah, maka diperlukan data yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil SP2010, hampir semua rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 98,97 persen berhasil didata dengan dokumen C1 sedangkan sisanya didata dengan dokumen C2 dan L2. Dengan kuesioner C1 maka informasi perumahan pada setiap rumah tangga akan didapatkan secara lengkap, sementara dengan dokumen lainnya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak ditanyakan. Jumlah rumah tangga menurut jenis kuesioner/dokumen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dokumen, 2010

Jenis Dokumen	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
C1	2.484.103	98,97
C2 Umum	523	0,02
C2 Apartemen	24.243	0,96
C2 Diplomat	905	0,04
L2	207	0,01
Jumlah	2.509.981	100,00

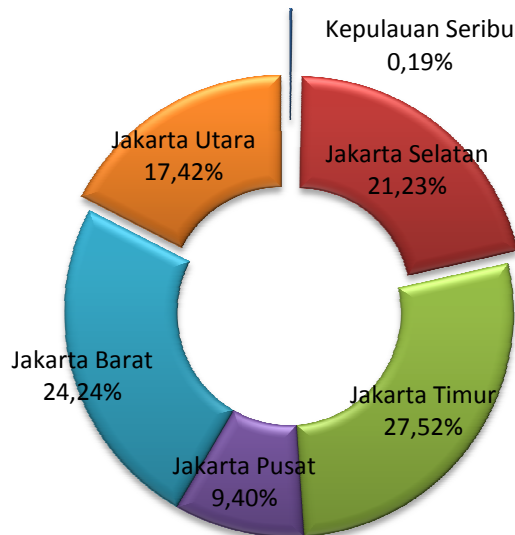
Sumber: Diolah dari dokumen C1, C2 dan L2

Idealnya satu bangunan tempat tinggal dihuni satu rumah tangga. Dalam kenyataannya, tidak sedikit suatu bangunan tempat tinggal dihuni dua atau lebih rumah tangga. Sementara itu, pencacahan SP2010 menggunakan pendekatan rumah tangga, akibatnya bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh dua atau lebih rumah tangga akan dicacah berkali-kali sesuai dengan banyaknya rumah tangga yang ada. Karena itu, perlu dipahami bahwa hasil SP2010 tidak menggambarkan banyaknya bangunan tempat tinggal (rumah) di Provinsi DKI Jakarta, melainkan memperlihatkan gambaran tentang banyaknya rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta yang menghuni bangunan tempat tinggal menurut karakteristiknya.

2.1. Persebaran Penduduk

Dari hasil SP2010, mayoritas penduduk di provinsi DKI Jakarta tinggal di kotamadya Jakarta Timur yaitu sebesar 27,52 persen, sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah kabupaten Kepulauan Seribu (0,19 persen). Persebaran penduduk di wilayah provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1. Persebaran Penduduk menurut Kabupaten/Kota , 2010



Sumber : Diolah dari dokumen C1, C2 dan L2

2.2. Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan

2.2.1. Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh. Penduduk yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah dibanding penduduk yang berpenghasilan lebih rendah.

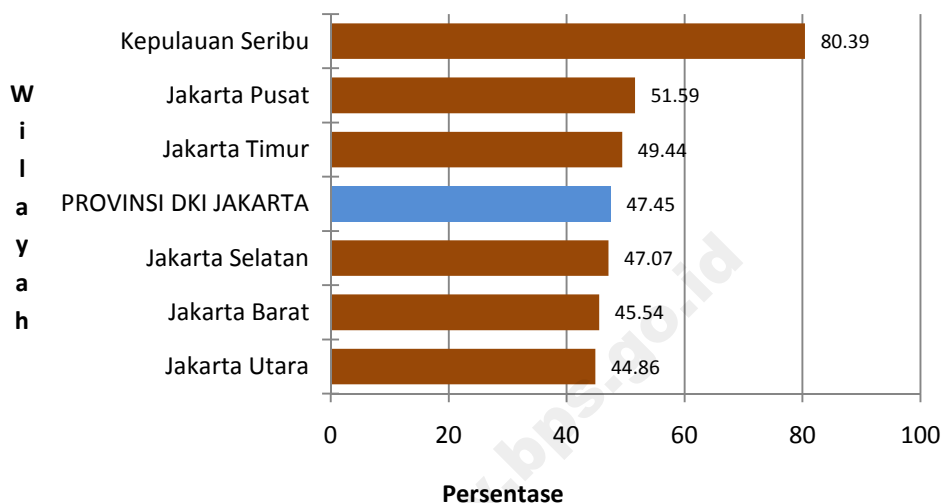
Tabel 3. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/ Penguasaan Tempat Tinggal, 2010

Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Milik sendiri	1.190.323	47,45
Kontrak	444.301	17,71
Sewa	694.238	27,68
Lainnya	179.484	7,16
Jumlah	2.508.346	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen.

Menurut hasil SP2010, ada sekitar 47,45 persen rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta menempati rumah milik sendiri sedangkan sisanya menempati rumah kontrak (17,71 persen), sewa (27,68 persen) dan lainnya (7,16 persen).

Gambar 2. Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri menurut Kabupaten/Kota, 2010



Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen.

Pada Gambar 2 di atas, terlihat persentase rumah tangga yang status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggalnya milik sendiri paling tinggi berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 80,39 persen, berbeda cukup jauh dengan di wilayah lainnya yang berkisar antara 44,86 persen sampai dengan 51,59 persen. Bahkan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara persentase rumah tangga yang status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggalnya milik sendiri masih di bawah angka provinsi.

Pada Tabel 4 dapat dilihat lebih rinci status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal menurut jenis kelamin kepala rumah tangganya sebagai berikut:

Tabel 4. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010

Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Milik sendiri	46,95	50,16
Kontrak	28,61	22,64
Sewa	17,15	20,75
Lainnya	7,29	6,45
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen.

Di Provinsi DKI Jakarta, rumah tangga yang dikepalai laki-laki sekitar 46,95 persen menempati rumah berstatus milik sendiri. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai perempuan yaitu sebesar 50,16 persen. Sebaliknya rumah tangga yang status rumahnya kontrak, lebih tinggi rumah tangga yang dikepalai laki-laki (28,61 persen) dibanding yang dikepalai perempuan (22,64 persen).

2.2.2. Bukti Kepemilikan

Untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah tempat tinggal maka setiap petak tanah seharusnya mempunyai bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Dengan adanya bukti kepemilikan atas suatu petak tanah, diharapkan dapat menjadi kekuatan hukum jika suatu saat terjadi sengketa atas tanah tersebut.

Bukti kepemilikan tanah tempat tinggal yang dikumpulkan melalui Sensus Penduduk 2010 adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama ART, SHM bukan atas nama ART, Sertipikat lain (SHGB, SHP, SSRS), dan Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain). Pertanyaan mengenai bukti kepemilikan tanah tempat tinggal ini hanya ditanyakan kepada rumah tangga yang status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggalnya adalah milik sendiri.

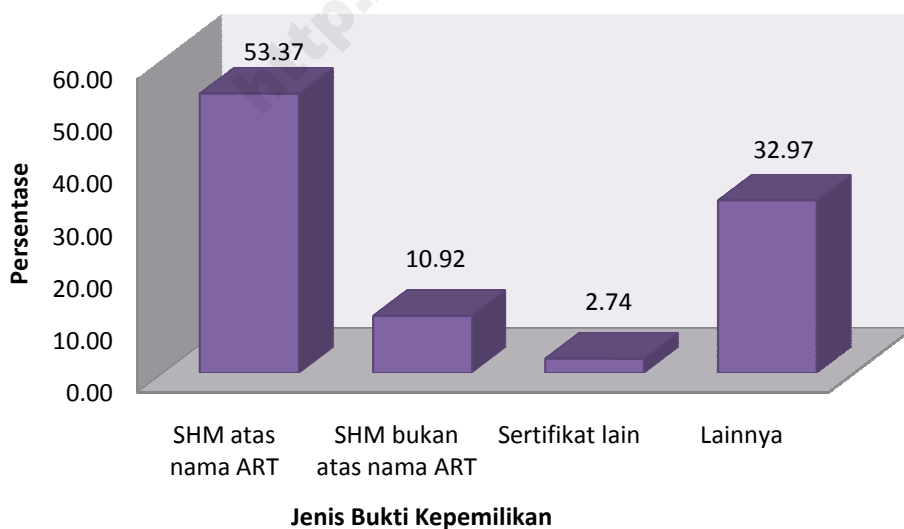
Tabel 5. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri menurut Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal, 2010

Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Memiliki bukti	1.113.219	93.52
Tidak memiliki bukti	77.104	6.48
Jumlah	1.190.323	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen.

Pada Tabel 5 di atas, terlihat bahwa dari 1.190.323 rumah tangga yang tinggal di rumah berstatus milik sendiri, sebanyak 1.113.219 rumah tangga atau 93.52 persen diantaranya memiliki bukti kepemilikan atas tanah tempat tinggalnya baik berupa SHM, Sertipikat lain maupun bukti lainnya.

Gambar 3. Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan/ Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal menurut Jenis Bukti Kepemilikan, 2010



Sumber: Diolah dari Kuesioner C1 dan C2 Apartemen.

Pada Gambar 3, rumah tangga yang menempati rumah berstatus milik sendiri dirinci menurut jenis bukti kepemilikan tanah, yaitu sebesar 53,37 persen memiliki SHM atas nama ART. Artinya, lebih dari setengah rumah tangga di DKI Jakarta menempati tempat tinggal yang tanahnya telah mempunyai kepastian hukum yang kuat. Namun, persentase rumah tangga yang jenis bukti kepemilikannya masuk kategori Lainnya (Girik, Akte Jual Beli Notaris/PPAT, dan lain-lain) masih cukup besar, yaitu 32,97 persen. Karena itu, keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam meningkatkan status kepemilikan tanah dari Girik, Akte Jual Beli, dan sejenisnya menjadi SHM masih perlu ditingkatkan.

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan/Penguasaan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri dan Memiliki Bukti Kepemilikan Menurut Jenis Bukti Kepemilikan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010

Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
SHM atas nama ART	53,46	52,90
SHM bukan atas nama ART	11,06	10,20
Sertipikat lain (SHGB,SHP,SSRS)	2,72	2,88
Lainnya (Girik,Akte Jual Beli Notaris/ PPAT,dll)	32,76	34,02
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Kuesioner C1 dan C2 Apartemen.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin kepala rumah tangga (Tabel 6) maka kesadaran kepala rumah tangga laki-laki untuk memiliki bukti kepemilikan berupa SHM, baik atas nama ART maupun bukan atas nama ART, sedikit lebih tinggi daripada kepala rumah tangga perempuan, yaitu 64,53 persen dibanding 63,10 persen.

2.3. Jenis dan Luas Lantai

2.3.1. Jenis Lantai Terluas

Ditinjau dari sisi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah. Bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori dari rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya

adalah keramik/marmer/ granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas, 2010

Jenis Lantai Terluas	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Keramik/marmer/granit	1.881.622	75,01
Ubin/tegel/teraso	324.554	12,94
Semen/bata merah	190.682	7,60
Kayu/papan	102.235	4.08
Bambu	334	0.01
Lainnya	664	0.03
Tanah	8.255	0.33
Jumlah	2.508.346	100,00

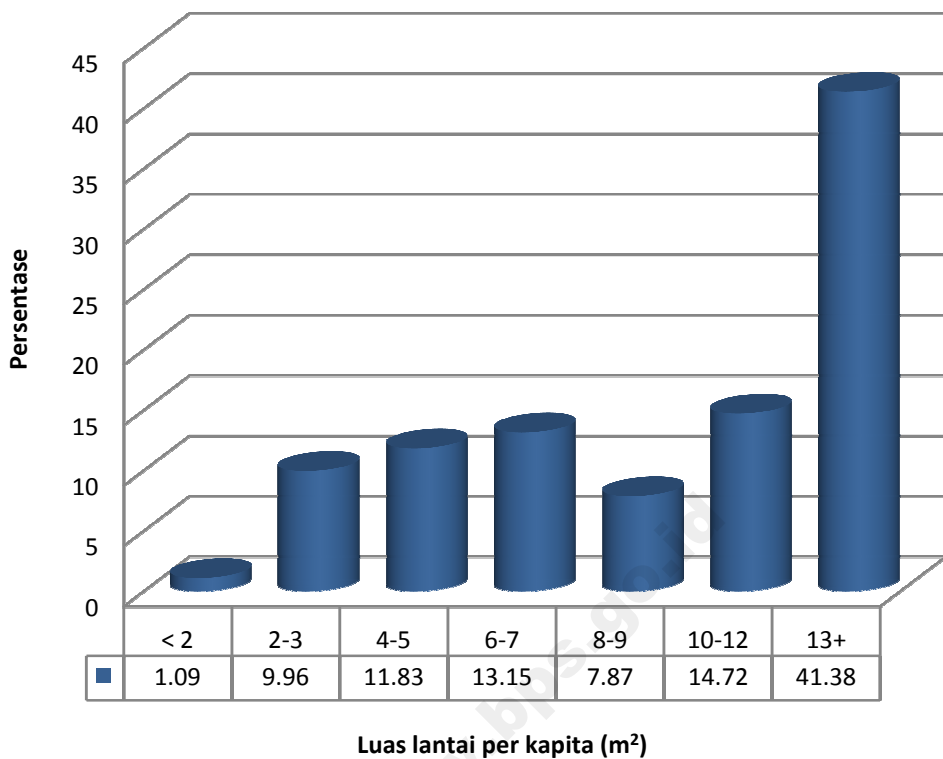
Sumber: Diolah dari Kuesioner C1 dan C2 Apartemen.

Di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar (75,01) rumah tangga sudah menggunakan keramik/marmer/granit sebagai lantai rumah tempat tinggal. Jenis lantai ini dianggap paling baik kualitasnya dibandingkan dengan jenis lainnya. Namun demikian di Provinsi DKI Jakarta masih terdapat rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal yang berlantai tanah yaitu sebesar 0,33 persen.

2.3.2. Luas Lantai

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, luas lantai juga menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai per kapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi jumlah penduduk.

Gambar 4. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita , 2010



Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen.

Pada Gambar 4 disajikan data luas lantai per kapita. Sebagian besar rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas lantai per kapita sebesar 13 meter persegi atau lebih (41,38 persen). Pada gambar tersebut juga terlihat adanya suatu pola, yaitu semakin besar ukuran luas lantai per kapita maka semakin besar pula persentase rumah tangga yang menempatinnya, kecuali pada luas lantai perkapita 8-9 meter persegi.

Menurut Kementerian Kesehatan, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 8 meter persegi, sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan untuk setiap orang minimal adalah 10 meter persegi.

Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai perkapita yang ideal (minimal 8 meter persegi) sebesar 63.97 persen. Sementara itu, menurut klasifikasi WHO dan APHA

maka persentase rumah tangga dengan ukuran luas lantai perkapita ideal (minimal 10 meter persegi) sebesar 56,1 persen.

2.4. Sumber Penerangan Utama

Sumber penerangan di rumah tangga juga aspek perumahan yang perlu diperhatikan. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktifitas. Penerangan yang dianggap paling baik adalah yang menggunakan listrik baik itu yang disalurkan oleh PLN maupun yang bukan dari PLN.

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama, 2010

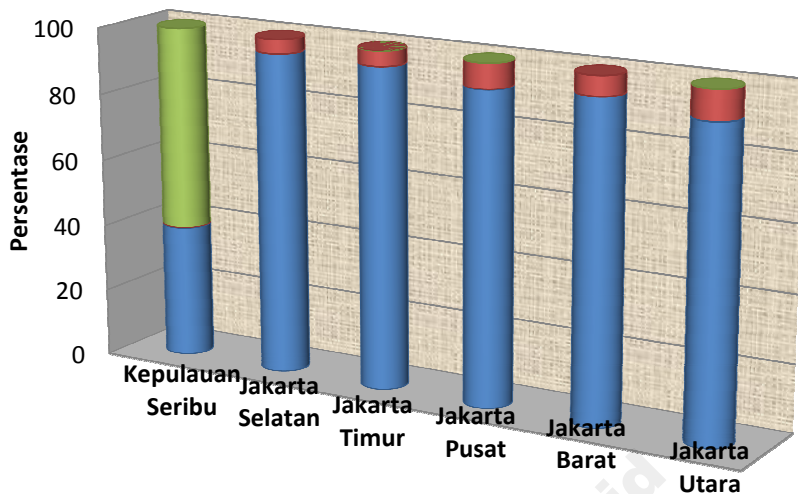
Sumber Penerangan Utama	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Listrik	2.508.222	99,97
- PLN dengan meteran	2.360.270	94,07
- PLN tanpa meteran	144.974	5,78
- Bukan PLN	2.978	0,12
2. Bukan Listrik	647	0,03
Jumlah	2.508.869	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen.

Dari Tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa hampir semua rumah tangga di provinsi DKI Jakarta sudah menikmati pembangunan infrastruktur listrik, yaitu sebanyak 99,97 persen rumah tangga sudah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, dan hanya 0,03 persen rumah tangga yang belum menggunakan listrik. Rumah tangga yang sudah menggunakan penerangan listrik sebagian besar bersumber pada PLN dengan menggunakan meteran sendiri (94,07 persen) akan tetapi masih ada juga yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran/ *nyantol* yaitu sebanyak 5,78 persen.

Jika dilihat lebih rinci perihal sumber penerangan listrik akan terlihat variasi menurut wilayah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Listrik menurut Jenis Sumber Penerangan, 2010



Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen.

Pada semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta kecuali di Kabupaten Kepulauan Seribu, rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan berasal dari listrik PLN dengan meteran sudah di atas 90 persen. Kondisi yang berbeda terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu dimana mayoritas rumah tangganya menggunakan sumber penerangan utama listrik yang bersumber dari Non PLN (65,52 persen), sementara yang bersumber dari PLN (meteran dan non meteran) hanya 39,48 persen.

2.5. Sumber Air Minum

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Di samping pemenuhan kebutuhan akan air harus mencukupi, tentunya harus diperhatikan juga faktor kebersihan dan kesehatan air yang digunakan.

Dalam SP2010 dimuat pertanyaan mengenai sumber air minum yang utama digunakan oleh rumah tangga untuk mengukur kebersihan dan kesehatan air yang digunakan. Hasilnya adalah seperti tabel berikut:

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum, 2010

Sumber Air Minum	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Air kemasan	1.271.735	50,69
Ledeng sampai rumah	491.771	19,60
Ledeng eceran	133.371	5,32
Pompa	464.282	18,51
Sumur terlindung	138.340	5,51
Sumur tidak terlindung	3.054	0,12
Mata air terlindung	2.461	0,10
Mata air tidak terlindung	63	0,00
Air sungai	1	0,00
Air hujan	2.408	0,10
Lainnya	1.383	0,05
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen.

Berdasarkan hasil SP2010, sebagian besar rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta menggunakan air kemasan (baik bermerk maupun isi ulang) sebagai sumber air minum utama, yaitu sebesar 50,69 persen kemudian diikuti oleh ledeng (baik sampai rumah maupun eceran) sebesar 24,92 persen dan pompa sebesar 18,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ledeng belum menjadi pilihan utama sebagai sumber air minum padahal harga ledeng jauh lebih murah dibandingkan air kemasan. Untuk itu merupakan sebuah tantangan bagi PAM/ PDAM penyedia air ledeng untuk dapat menyediakan air ledeng yang sehat, berkualitas, terjangkau dan dapat dikonsumsi sebagai air minum oleh semua orang.

Selain air kemasan dan ledeng, air yang berasal dari dalam tanah (pompa, sumur terlindung, dan sumur tidak terlindung) masih banyak dikonsumsi oleh rumah tangga sebagai sumber air minum, yaitu sebanyak 24,14 persen rumah tangga masih menggunakan air dari dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan air minumnya. Air yang berasal dari dalam tanah

mempunyai hubungan dengan kelestarian lingkungan. Karena itu, penggunaan air minum yang berasal dari dalam tanah perlu dikurangi agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

2.6. Sanitasi

2.6.1. Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Salah satu kebutuhan penting dalam rumah tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Rumah tangga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa lebih terjaga kebersihannya.

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2010

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Jamban Sendiri	1.918.540	76,47
Jamban Bersama	473.621	18,88
Jamban Umum	96.768	3,86
Tidak ada	19.940	0,79
Jumlah	2.508.869	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen.

Berdasarkan hasil SP 2010, sebagian besar rumah tangga sudah mempunyai fasilitas jamban sendiri (76,47 persen) sedangkan yang tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar/ jamban hanya 0,79 persen. Rumah tangga yang tidak memiliki jamban biasanya menggunakan lahan terbuka yang bisa (tanah lapang/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam, dan lainnya secara langsung untuk buang air besar.

2.6.2. Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tempat penampungan kotoran/tinja sangat berpengaruh terhadap kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat sanitasi akan menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar seperti mempengaruhi kualitas air tanah dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Tempat

penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang Fasilitas Buang Air Besarnya Jamban menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2010

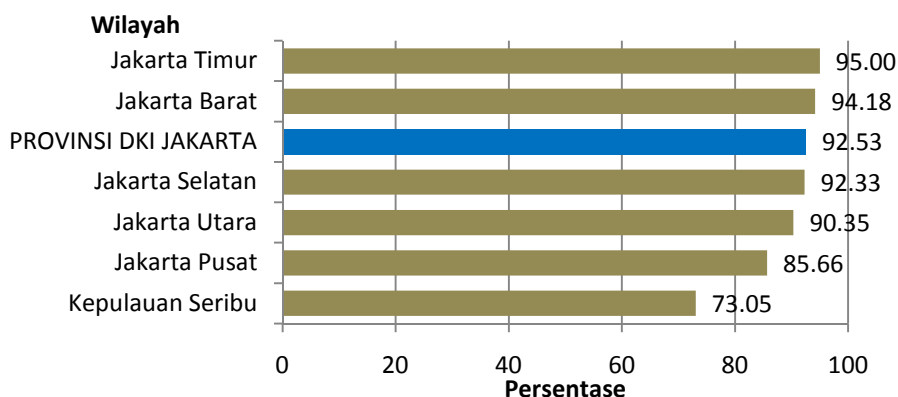
Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Tangki septik	2.302.499	92,53
Tanpa tangki septik	111.201	4,47
Tidak punya	74.758	3,00
Jumlah	2.488.458	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen.

Dari hasil SP2010, sebanyak 92,53 persen rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta, yang menggunakan jamban sendiri sudah mempunyai tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik. Sedangkan sebanyak 4,47 persen tanpa tangki septik dan 3 persen tidak punya pembuangan akhir tinja.

Jika dilihat lebih rinci menurut kabupaten/kota, Hanya ada empat provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan tangki septik berada di Jakarta Timur (95 persen), sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (73,05 persen).

Gambar 6. Persentase Rumah Tangga yang Fasilitas Buang Air Besarnya Jamban dan Tempat Akhir Pembuangan Tinjanya Tangki Septik menurut Kabupaten/Kota, 2010.



Sumber: Diolah dari Dokumen C1, C2 Umum, dan C2 Apartemen.

2.7. Bahan Bakar untuk Memasak Sehari-hari

Secara umum bahan bakar untuk memasak dikelompokkan menjadi bahan bakar padat (kayu bakar, arang, dan lainnya) dan bahan bakar tidak padat (listrik, gas, dan minyak tanah). Isu penggunaan bahan bakar padat untuk memasak sedang hangat dibicarakan saat ini karena jenis bahan bakar ini dapat menyebabkan polusi udara serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya sumber daya hutan.

Tabel 12. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar yang Digunakan untuk Memasak, 2010

Jenis Bahan Bakar untuk Memasak	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
1. Bahan Bakar Tidak Padat	2.229.602	89,75
- Listrik	33.177	1,33
- Gas	2.079.134	83,70
- Minyak Tanah	117.291	4,72
2. Bahan Bakar Padat	16.548	0,67
- Arang	111	0,01
- Kayu Bakar	5.559	0,22
- Lainnya	10.878	0,44
3. Tidak pakai/ tidak memasak	237.953	9,58
Jumlah	2.484.103	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa penggunaan bahan bakar tidak padat untuk keperluan memasak di provinsi DKI sudah mendekati 90 persen. Meskipun masih ada yang menggunakan bahan bakar padat tapi persentasenya tidak sampai 1 persen.

Bila dilihat dari jenisnya, sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan gas sebagai bahan bakar memasak yaitu sebesar 83,70 persen. Penggunaan bahan bakar lain persentasenya cukup kecil seperti minyak tanah yang hanya 4,72 persen dan listrik 1,33 persen.

2.8. Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal

Dalam SP2010, kondisi ideal sebuah rumah tinggal dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas pokok yang biasanya digunakan oleh rumah tangga. Fasilitas tersebut antara lain:

berlantai bukan tanah, menggunakan sumber penerangan listrik, bahan bakar memasak listrik/gas dan mempunyai jamban sendiri dengan tempat pembuangan akhir berupa tangki septik.

Dari hasil SP 2010 diketahui kelengkapan fasilitas pokok rumah tangga menurut jenis kelamin kepala rumah tangganya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Persentase Rumah Tangga menurut Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2010

Kelengkapan Fasilitas Pokok Bangunan Tempat Tinggal	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah	99,66	99,72	99,67
Sumber Penerangan Listrik	99,98	99,97	99,97
Bahan bakar memasak Listrik/Gas	86,52	76,92	85,03
Memiliki Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	96,23	96,06	96,20

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2

Dari tabel di atas, perbedaan jenis kelamin kepala rumah tangga tidak menunjukkan perbedaan yang berarti pada fasilitas pokok rumah tinggal terutama pada lantai bukan tanah, sumber penerangan listrik, dan jamban sendiri dengan tangki septik, namun pada bahan bakar memasak listrik/gas, terlihat cukup perbedaan antara kepala rumah tangga laki-laki dengan perempuan yaitu kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki (86,52 persen) memiliki persentase yang lebih tinggi dari pada kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan (76,92 persen).

2.9. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menurut Wikipedia Berbahasa Indonesia, **Teknologi Informasi dan Komunikasi**, TIK (bahasa Inggris: Information and Communication Technologies; ICT) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi

komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Contoh dari teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya telepon seluler).

Penggunaan teknologi informasi oleh rumah tangga berdasarkan hasil SP2010 tergambar sebagai berikut:

Tabel 14. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Penguasaan Telepon, 2010

Penguasaan Telepon	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Telepon Kabel	40.620	1,62
Telepon Seluler	1.725.832	68,80
Telepon Kabel dan Seluler	619.606	24,70
Tidak Punya	122.288	4,88
Jumlah	2.508.346	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen.

Dalam hal komunikasi, sebagian besar rumah tangga di provinsi DKI Jakarta sudah menguasai telepon yaitu sebesar 95,12 persen baik itu berupa telepon kabel, seluler maupun menguasai keduanya, hanya 4,88 persen yang tidak punya telepon. Jika dilihat menurut jenis telepon maka yang banyak dikuasai oleh rumah tangga adalah telepon seluler saja (68,80 persen), sedangkan yang menguasai telepon kabel dan seluler sebanyak 24,70 persen dan telepon kabel sebanyak 1,62 persen.

Tabel 15. Jumlah dan Persentase Rumah Tangga menurut Akses Internet selama 3 Bulan Terakhir, 2010

Akses Internet	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Ya	751.880	29,98
Tidak	1.756.466	70,02
Jumlah	2.508.346	100,00

Sumber: Diolah dari Dokumen C1 dan C2 Apartemen.

Sementara itu, persentase rumah tangga yang melakukan akses internet dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sebesar 29,98 persen. Angka ini masih tergolong rendah sehingga perlu usaha yang gigih agar pemanfaatan internet semakin populer di masyarakat. Karena internet adalah salah satu sumber informasi yang multi bidang dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa saja yang baru terjadi di tempat lain dapat diketahui dengan cepat.

BAB III. PENUTUP

Permasalahan perumahan dapat dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Jumlah penduduk yang besar serta keterbatasan lahan yang tersedia dapat mendorong tingginya permintaan terhadap kebutuhan perumahan. Tingginya permintaan tersebut harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia (sisi penawaran). Penting bagi pemerintah untuk mengusahakan keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran, karena bila terjadi ketidakseimbangan dapat berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat.

Dengan diterbitkannya publikasi ringkas ini, kami berharap dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat di bidang perumahan dengan menyediakan data perumahan hasil SP2010 sehingga keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran kebutuhan perumahan dapat tercapai.

Tentu saja publikasi ini masih ada yang perlu diperbaiki agar menjadi sempurna. Kami akan menampung segala kritik dan saran dari pembaca, karena jiwa yang besar adalah jiwa yang mau menghargai pendapat orang lain. Semoga bermanfaat.

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: +62 021 3841195, 3842508, 3810291, Fax.: +62 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

ISBN. 978-979-064-429-8



9 789790 644298